

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR
827/PDT.G/2007/PA MAKASSAR)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ILYAS
10100110016

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ILYAS**, NIM: 10100110016, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 15 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag
NIP. 19711020 199703 1 002


Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
NIP. 1964060 199303 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILYAS
NIM : 10100110016
Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 08 Oktober 1991
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/S1
Alamat : Jl H. Bohari No. 110 Kabupaten Maros
Judul : Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2014
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
ILYAS
NIM: 10100110016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)”, yang disusun oleh Ilyas, NIM: 10100110016, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 22 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 26 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Agustus 2014 M
26 Syawal 1435 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A | (.....) |
| Sekretaris | : Dra. Sohrah, M.Ag | (.....) |
| Munaqisy I | : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi | (.....) |
| Munaqisy II | : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing II | : Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag | (.....) |



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul: Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA/Makassar). Shalawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita pada segala aspek kehidupan yakni Rasulullah Muhammad Saw.

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 (Strata 1). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Muh Rusdi Mude dan Ibunda Siti Aisyah yang tiada lelah berhenti berdoa untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spritual untuk kelancaran studi bagi penyusun.

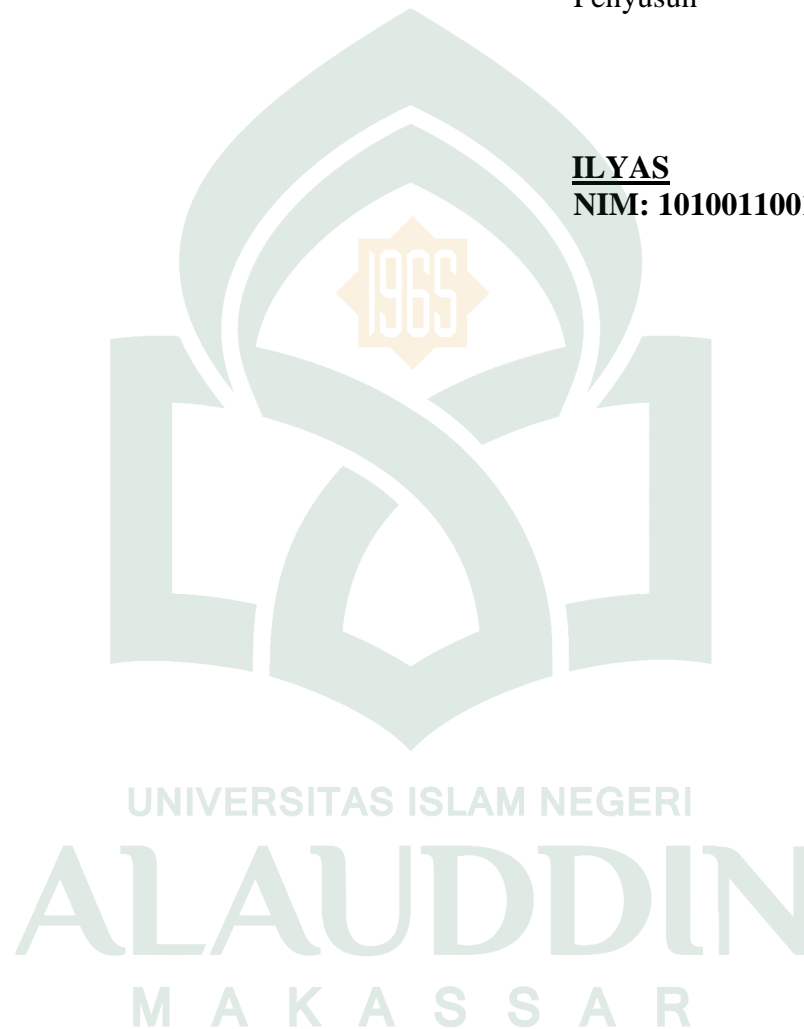
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Wakil Rektor serta seluruh staf UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, serta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag dan A. Intan Cahyani, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Peradilan Agama. Dengan segenap rasa tulus memberikan kontribusi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, motivasi, nasihat serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag dan Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag., selaku pembimbing I dan II, yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen, Staf Jurusan Peradilan Agama tak lupa penulis haturkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihatnya selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Peradilan Agama.
7. Ketua Pengadilan Agama Makassar beserta jajarannya yang senantiasa memberikan bantuannya selama penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar.
8. Saudara-saudari seperjuangan di Jurusan Peradilan Agama angkatan 2010, Faqihah Ahsan, Abdul Rahim, A. Sultan Sulfian, Firman As'ad, Khaerul Khuluk, Muh. Taufik Al hidayah dan teman-teman yang tidak dapat saya tulis namanya secara menyeluruh bersama melewati suka dan duka selama kuliah, menata masa depan yang cerah.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berserah diri semoga melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Agustus 2014
Penyusun

ILYAS
NIM: 10100110016



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II. TINJAUAN TEORITIS | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Poligami | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan..... | 27 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 35 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 39 |
| B. Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan | |
| Agama Makassar | 41 |
| C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan | |
| Poligami Karena Pemalsuan Identitas..... | 46 |
| D. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan | 56 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Nama : ILYAS

NIM : 10100110016

Judul : Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)

Judul skripsi ini adalah Implikasi pembatalan perkawinan poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar).

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja ketika seseorang ingin berpoligami. Oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, ada kecenderungan masyarakat melakukan hal-hal negatif demi terwujudnya poligami tersebut, misalnya secara diam-diam maupun dengan cara memalsukan identitas. Perkawinan Poligami seperti ini melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan seperti ini dapat dibatalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan Teologi normatif (syar'i).

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat tinggal suami atau istri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut oleh karena adanya syarat-syarat perkawinan yang dilanggar. Tergugat I terbukti telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu dan perkawinan poligami tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, Tergugat I juga terbukti telah memalsukan identitasnya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut antara lain terhadap hubungan suami istri, dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada, akibat hukum terhadap harta bersama dimana harta bersama dibagi dua, masing-masing suami dan istri mendapat separuh. Mengenai akibat hukum terhadap anak, dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut hal ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta) terutama dalam mewujudkan tatanan masyarakat ideal. Sebagai upaya kearah tersebut, perkawinan dianggap sebagai dasar pembentuk dan pembangunan sebuah masyarakat, sebab dari sana akan muncul generasi-generasi yang akan membangun dan meneruskan keturunan umat manusia secara keseluruhan. Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan. Serta penyebab perolehan keturunan yang saleh yang akan mendatangkan kebahagiaan kehidupan dunia dan di akhirat.¹

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam Al Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat, baik itu yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar menjadi jembatan yang mengantarkan manusia baik laki-laki maupun perempuan menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia).²

¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet.1; Jakarta :Kencana, 2003), h.7.

² Musfir Azzahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press,1996), h.15.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar Rum/30: 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Ayat diatas mengindikasikan bahwa tujuan utama perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang serta di ridhoi oleh Allah SWT.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ikatan lahir batin disini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, akan tetapi yang dikehendaki Undang-undang adalah kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga serta kebahagiaan dunia akhirat.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya justru istri yang memiliki suami

³ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Serajaya Santra Indonesia, 2012), h. 656.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

lebih dari satu dalam waktu yang sama. Akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri ini tidak banyak dipraktekkan.

Perkawinan poligami sering kali mendapat penolakan oleh banyak kalangan, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pandangan buruk mengenai poligami ini muncul karena praktek-praktek poligami yang terjadi ditengah masyarakat lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Beberapa dampak negatif dari perkawinan poligami ini adalah perceraian, suami akan meninggalkan istri dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, suami tidak berlaku adil antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dimana suami yang berpoligami lebih mementingkan istri mudanya dibanding istri tuanya.

Pada prinsipnya hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menghendaki adanya azas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, baik hukum islam maupun hukum positif di Indonesia tetap membolehkan adanya poligami .

Azas monogami diberlakukan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari poligami itu sendiri, sehingga dengan demikian poligami hanya diperbolehkan jika kondisi sangat menuntut, Dan poligami pun merupakan pintu darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkannya. Di samping hal tersebut, poligami hanya diizinkan dengan memperhatikan syarat yakni dapat dipercaya bahwa orang yang melakukan poligami tersebut benar- benar dapat menegakkan keadilan dan aman dari suatu perbuatan yang melampaui batas. Jadi tidak semua pria boleh melaksanakan poligami.⁵

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk

⁵ Farid miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga* (Jakarta : Gema Insani, 1999), h.54.

dipenuhi begitu saja. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UUP beserta penjelasannya antara lain harus mendapat izin dari pengadilan, dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya atau tidak ada larangan dalam hal ini. Sementara itu, untuk memperoleh izin dari pengadilan, harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UUP, yakni permohonan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya persetujuan dari isteri yang terdahulu, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan suami akan berlaku adil. Oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, ada kecenderungan masyarakat melakukan hal-hal negatif demi terwujudnya poligami tersebut, misalnya secara diam-diam, tanpa didaftarkan pada pencatatan nikah, maupun dengan identitas palsu.

Salah satu realita yang terjadi di masyarakat dan menjadi objek penelitian penulis, yakni kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar. Kasus yang penyusun teliti bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami (Tergugat I) dengan seorang perempuan (Tergugat II). Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama (Penggugat), juga adanya kebohongan yakni pemalsuan identitas yang dilakukan Tergugat 1 baik mengenai umurnya, statusnya, dan juga alamatnya sehingga dicatat oleh pegawai pencatat nikah (Tergugat III). Akhirnya Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dengan diterbitkannya putusan Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor : 827/Pdt.G/2007/PA.Makassar.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan padanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan hukum antara suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunan, serta harta bersama mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implikasi pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)”?

Untuk mengkaji masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 827/pdt.G/2007/PA Makassar ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Judul skripsi ini adalah implikasi pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar). Untuk menghindari *miss interpretation* dalam memahami istilah atau kata-kata judul tersebut, maka penulis akan mengemukakan pengertian beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

Implikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁶

Pembatalan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan membatalkan.⁷

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang

⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008), h. 548.

⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008), h. 145.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan undang undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2007), h. 8.

bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang perempuan.⁹

Pemalsuan berasal dari kata dasar “palsu”. Arti palsu adalah tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Sedangkan pemalsuan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memalsukan.¹⁰

Identitas dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda ; jati diri.¹¹

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Makassar, judul skripsi ini adalah Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar), fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut namun penyusun terlebih dahulu mencoba mengkaji bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian penulis telah mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya :

⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008), h. 1035

¹⁰ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), h. 398.

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008), h. 538.

1. Hukum Islam di Indonesia yang disusun oleh Ahmad Rafiq, buku ini membahas tentang batalnya perkawinan, serta usaha-usaha pencegahan yang dilakukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat.
2. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama disusun oleh A. Mukti Arto, dalam buku beliau ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Poligami dalam hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia oleh Muhammad Saleh Ridwan, buku yang disusun oleh beliau membahas bagaimana dasar hukum poligami dalam Alquran serta bagaimana hukum poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.
4. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum adat dan Hukum Agama disusun oleh Hilman Hadikusuma, buku ini membahas bagaimana pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian terhadap beberapa literatur tersebut, maka penulis merasa permasalahan tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan diteliti lebih lanjut, karena kajian-kajian di atas belum membahas secara khusus tentang pembahasan yang penyusun teliti.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama Makassar nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar;

- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya adalah :

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya masalah pembatalan perkawinan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan dan cara penyelesaiannya;
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah perkawinan khususnya yang ingin berkeluarga;
- 3) Untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu syariah pada jurusan Peradilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah *Al-Jam'u* dan *Al-dhamu* yang artinya kumpul.² makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Wath'u Al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdhar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³ Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata

¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), h. 136.

² H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.

“kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena di dalamnya terdapat suatu proses perkawinan terhadap “ijab” (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan “qabul” (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).

Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁵

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

⁴ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 14.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Pasal I.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁷ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.⁸ Sedangkan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang).

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengahalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar rum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 11.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 13.

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.⁹

3. Rukun dan syarat Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.¹⁰

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam islam antara lain :

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan : Zahir Tradingco, 1975), h. 35

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun, 1974*, Pasal 2.

a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

1) Calon mempelai pria

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon mempelai wanita

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuannya;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.¹²

b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An nisa/4: 4

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974), h. 66.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹³

c. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan

Wali bagi seseorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.¹⁴

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwakilannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakili. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakili kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

Sebagai contoh, ketika dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakili hak perwaliannya

¹³ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71.

kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).¹⁵ Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang lain tidak menyaksikan. Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut :

1. Islam;
2. Minimal dua orang laki-laki;
3. Hadir dalam ijab qabul;
4. Dapat mengerti akad ijab qabul;
5. Dewasa.

e. Harus ada pengucapan *ijab dan qabul*

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan *ijab dan qabul* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samaran atau tidak

¹⁵ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 964.

dimengerti maksudnya.¹⁶ Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut, terdapat syarat yang menjadikan sah suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.¹⁷

4. Asas dan prinsip perkawinan

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut Hukum Islam ada 3 (tiga), asas yang harus diperhatikan yaitu Asas absolut abstrak, asas selektivitas dan asas legalitas. Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan, asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, dimana perkawinan wajib dicatatkan.¹⁸

Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁹

a. Prinsip kebenaran dalam memilih

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 74.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jilid 2; Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992.), h. 48.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 36.

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1960), h.41.

kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-rum ayat 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridho Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian untuk pria. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah An-nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara *ma'ruf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.²⁰

5. Keabsahan perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan. Baik yang menyangkut dengan anak

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 20.

(keturunan), maupun yang berkaitan dengan harta. Kriteria keabsahan suatu perkawinan telah dirumuskan dalam pasal 2 UUP sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UUP tersebut menetapkan 2 (dua) garis hukum yang harus dipatuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara jelas tentang keabsahan suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.²¹

Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan ini, dalam UUP tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Pencatatan ini semata-mata bersifat administratif. Yang menjadi bukti otentik telah dilangsungkannya suatu perkawinan.

²¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah krusial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 13.

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamien* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau suatu perkawinan lebih dari seorang”.²² Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.

Poligami biasa dibagi atas tiga yakni : poliandri, poligini dan group marriage (group family). Poliandri berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang berarti banyak, *aner* yang berarti negatif, dan *andros* yang berarti laki-laki.²³ Jadi, poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki, sedangkan poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan, jadi poligini adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang perempuan.²⁴ Poliandri tidak lazim dibicarakan oleh pakar perkawinan, yang lebih banyak diperbincangkan adalah poligini. Sedangkan group marriage atau group family merupakan gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya salah satu rumah ada lima laki-laki dan lima wanita, kemudian bercampur secara bergantian.

Pembagian poligami di atas adalah ditinjau dari segi antropologi sosial yang dalam perkembangannya istilah ini jarang sekali digunakan bahkan bisa dikatakan istilah tersebut tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropologi saja, sehingga penggunaan istilah poligami secara langsung menggantikan

²² Tim Redaksi Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam I* (Cet. III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.107.

²³ Hasan Shadly, *Ensiklopedia Nasional* (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 2376.

²⁴ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Cet. I; Surabaya : Usaha Nasional, 2001), h. 13.

istilah poligini dengan pengertian bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang.²⁵

2. Dasar Hukum Pengaturan Poligami

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat dalam Surah An-nisa ayat 3 dan 129 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²⁶

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 43.

²⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya :

“Dan kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil diantara wanita-wanita itu, walaupun kamu ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu, oleh sebab itu janganlah kamu condong kepada salah seorang diantaranya sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan dicerai. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat baik dan bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.²⁷

Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebagian ulama memahami adil baik materi atau imaterial (cinta) dan sebahagian lainnya hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah rasul dan ada yang mengatakan poligami adalah kehususan pada Nabi.

Adapun yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam *hubb* (cinta) dan *jima'* (hubungan intim suami istri) seperti Abdullah ibn Abbas, kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). Itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintainya.

Dari pemahaman seperti inilah sehingga suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang imaterial, meski ia telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memperingatkan bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia

²⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar kepada Allah.

Sebahagian yang lainnya mebolehkannya dengan alasan keadilan itu bukan pada masalah cinta, karena keadilan cinta diantara wanita-wanita itu adalah suatu hal yang mustahil, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah seorang diantara mereka, sehingga mereka memahami bahwa poligami boleh dilaksanakan, kata “*fankihu*” walaupun berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud “wajib”. Dan poligami itu dilaksanakan dengan syarat adil diantara istri-istri.

Jika merasa khawatir akan tidak berlaku adil, maka ia boleh menikah seorang saja, jika dia berpoligami akad nikahnya sah, maka ia berdosa dalam perbuatannya, namun ia menafsirkan bahwa adil yang merupakan syarat dalam poligami itu adalah adil dalam soal materi seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam serta apa yang berhubungan dengan pergaulan suami istri, yang mungkin diterapkan keadilan padanya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita memahami bahwa pada prinsipnya syariat Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat keadilan, kebahagiaan yang disertai niat suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata.²⁸

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Beberapa landasan hukum pengaturan hukum pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan

²⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, ed. Muslimin Kara (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 371.

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 serta Surat Edaran No. 08/SE/83 khusus mengatur izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam. Dari Beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU. No. 1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1974 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yakni apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Alasan dan syarat Poligami

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dilihat dari beberapa alasan diatas, pada dasarnya alasan-alasan ini mengacu pada tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berikut penjelasan mengenai alasan-alasan suami berpoligami :

- 1) Istri yang masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiat;
- 2) Istri yang cacat badannya, misalnya lumpuh, gila ataupun sakit yang susah disembuhkan. Kondisi tersebut tidak memungkinkan baginya untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik;²⁹
- 3) Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dalam kondisi seperti itu seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan.

²⁹ Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 374.

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- a) Ada persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁰

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selamasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dipertegas oleh pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yang dijelaskan bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.

Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan;

³⁰ Kementrian Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.³¹

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No.1 Tahun 1974, dipertegas oleh pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 yaitu ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal diatas, sebenarnya sesuai dengan Al- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Hanya saja dalam Surah An-nisa Ayat 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menjelaskan dengan kata-kata yang luas cakupannya. Dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang menurut Al-Qur'an, diantaranya harus dapat berbuat adil.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 53.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal :

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan;
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.³²

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut antara lain :

1) *syiqaq*

Yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang terus menerus. Ketentuan *syiqaq* ini terdapat dalam Q.S An nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 253.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha menegetahui lagi maha mengenal”³³.

2) Adanya cacat

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

3). Ketidak mampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak istri.

4). Suami gaib (al-mafqud)

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaanya dalam waktu yang lama.

5). Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut di bawah ini.

Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh :

- a) Pisah karena suami istri murtad;
- b) Perceraian karena perkawinan itu *fasakh* (rusak);
- c) Perpisahan karena tidak seimbangnya status (*kufu*) atau suami tidak dapat dipertemukan.

³³ Kementerian Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali :

- a) Pisah karena cacat salah seorang suami istri;
- b) Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami;
- c) Pisah karena li'an;
- d) Salah seorang suami istri itu murtad;
- e) Perkawinan itu rusak (fasakh);
- f) Tidak ada kesamaan status (kufu).

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini:

- a) Terjadinya li'an;
- b) Fasakhnya perkawinan;
- c) salah seorang pasangan itu murtad.³⁴

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila :

³⁴ A. Rahman I Doi, *Syariah I kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1996), h. 309-310.

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *raj'i*;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang di li'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³⁵

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

³⁵ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta : Nuansa Aulia, 2012), h. 21-23.

3. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupa-rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan undang-undang maka perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materil itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami istri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu.

Dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau

di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-undang Nomor 1974 jo PP No.9 Tahun 1975).

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³⁶



³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Pasal 28

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹ Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Makassar, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 21.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18.

2. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*)

Yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

C. *Jenis dan Sumber Data*

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Makassar, atau orang-orang yang secara langsung terkait dengan perkara, baik pihak-pihak materil maupun pihak-pihak formal yang terdiri atas kuasa hukum atau kuasa insidentil.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi dalam hal ini bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab dengan hakim serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
2. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1986), h.172.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: *pertama*, ialah identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, Verifikasi data yakni meneliti keabsahan data.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Makassar merupakan salah satu institusi pengadilan di Sulawesi-Selatan yang lokasinya terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan km. 14 Makassar.

Sebagai lembaga pelaksana tugas peradilan, tentunya Pengadilan Agama Makassar memiliki visi, yaitu “Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesionalitas dalam penegakan hukum dan keadilan menurut supremasi hukum”.

Pengadilan Agama yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari segala hal yang berbentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bebas dari KKN merupakan topik yang harus selalu diprioritaskan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan asas keadilan masyarakat. Profesionalisme, mengandung arti yang luas yaitu profesionalitas dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme dalam manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan
2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Pengadilan Agama Makassar sebagai institusi peradilan memiliki tugas sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. dan ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Makassar terikat pada ketentuan mengenai Pengadilan Agama, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi

relatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar seperti tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Makassar yaitu pada wilayah hukum kota Makassar.

B. *Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum dimana perkawinan tersebut berlangsung, di tempat kedua suami-istri, di tempat tinggal istri atau di tempat tinggal suami. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹ Mengenai tata cara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa tata cara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Menurut penulis hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan

¹ AR. Buddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar, Tanggal 7 Juli 2014.

dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar pengadilan.

Berikut prosedur/tata cara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar.

1. Pengajuan gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang meliputi :

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan;
- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami-istri;
- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami;
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman istri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari :

- a. Foto kopi tanda penduduk;
- b. Surat pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat;
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon;
- d. Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan Perkara

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar lalu pemohon membayar panjar biaya perkara atau *vorschot*

baru setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara, pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

3. Tahap Persiapan

- a. Sub Kepaniteraan permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikannya kepada panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- b. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
- c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.
- d. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada ketua majelis/hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

- e. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada majelis hakim yang bersangkutan.

4. Pemanggilan

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan dalam Penetapan Hari Sidang. Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan kepada lurah atau kepala desa yang bersangkutan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya pemanggilan tersebut. Dan pemanggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan hakim ketua membuka persidangan, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dimulai dan hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya mencoba mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidakhadirannya, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan hakim memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebut tanpa panggilan lagi. hakim ketua memerintahkan kepada

pemohon dan kepada termohon untuk membawa saksi. Setelah penundaan di umumkan, persidangan kemudian dinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinan susunan persidangan sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu termohon tetap tidak hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah dipanggil secara patut. hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak majelis hakim mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah putusan tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh hakim ketua.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk menolak keputusan dan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan pengadilan agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir pada saat diucapkan putusan itu, pemohon atau termohon dapat mengajukan banding atas putusan itu kepada Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

5. Putusan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (pasal 28 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau mengungkapkan bahwa :

“Suatu perkawinan dinyatakan batal setelah berlaku 14 hari setelah diucapkan apabila persidangan dihadiri oleh ke dua belah pihak dan 14 hari setelah putusan diterima ketika salah satu tidak hadir pada saat pembacaan putusan”.²

² Abu Rahman, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar, Tanggal 7 Juli 2014.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Pengadilan :

- a. Mengirimkan satu salinan putusan pengadilan kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.
- b. Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh pengadilan agama sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para pihak.

Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini bisa saja dikabulkan dan ditolak oleh hakim. Jika ditolak disebabkan karena pemohon atau penggugat tidak dapat membuktikan permohonan pembatalan perkawinan, Sedangkan jika dikabulkan itu berarti alasan yang diajukan dapat dibuktikan oleh pemohon.³

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami karena Pemalsuan Identitas

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, majelis hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang baik bagi para pihak.

Pernyataan di atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan :

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan;
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

³ AR. Buddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar, Tanggal 7 Juli 2014.

3. Setiap putusan atau penetapan yang ditanda tangani oleh hakim ketua, hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta dalam persidangan;
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera yang ikut serta di dalam persidangan.

Kesimpulannya, yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan ialah alasan-alasan hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu, sehingga oleh karena itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dalam putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

1. Posisi Kasus Perkara Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar

Penulis telah melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Makassar. Penulis meneliti perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar, yaitu perkara Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2007 telah diajukan gugatan oleh saudara HA (Penggugat) terhadap saudara HB selanjutnya disebut sebagai (Tergugat I) dan saudara IN sebagai (Tergugat II) dan juga Kepala Urusan Agama Kecamatan Tamalate sebagai (Tergugat III) yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar. Saudara HB (Tergugat I) adalah merupakan suami dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 25 Maret 1984 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Gugatan yang diajukan oleh penggugat lantaran Tergugat I yang merupakan suami dari Penggugat ini telah melangsungkan perkawinan bersama wanita lain bernama IN (Tergugat II) tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Makassar. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate kota Makassar. Dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II

diketahui bahwa Tergugat I telah memalsukan identitasnya baik mengenai umurnya, statusnya dan juga alamatnya sebagaimana yang tertera pada buku nikah. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya pelanggaran dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2007 itu akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Makassar lewat putusan pembatalan perkawinan (827/Pdt.G/2007/PA Makassar). Dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan menyatakan Akta nikah Nomor 822/84/VIII/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Tergugat I juga tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 UUP yakni seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan harus mendapat persetujuan dari istri yang terdahulu. Dan juga Tergugat I terbukti telah memalsukan identitasnya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan oleh penggugat layak dikabulkan.

2. Pembuktian di Persidangan

Dalam persidangan penggugat dalam pembuktiannya mengajukan beberapa alat bukti yakni alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

dengan Tergugat I. Dengan diajukannya alat bukti tertulis berbentuk akta nikah tersebut, Penggugat ingin meyakinkan pada hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dan status Tergugat I adalah masih sebagai suami yang sah dari penggugat. Oleh karena itu perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami. Dengan alat bukti tersebut, Tergugat I tidak dapat menyangkal kebenarannya dan hal tersebut semakin menguatkan Penggugat bahwa Tergugat I telah melanggar Undang-undang Perkawinan tentang poligami.

Alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat ingin membuktikan memang telah terjadi perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana ada unsur penipuan didalamnya karena terbukti di dalam kutipan akta nikah tersebut Tergugat I telah memalsukan identitasnya, baik berupa umur maupun statusnya maka pantaslah bila perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan demi hukum.

Selanjutnya, dalam pembuktian dipersidangan Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang bersaksi di bawah sumpah

- a. Saksi pertama bernama Sanga binti baso. Pada kesaksiannya saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I;
 - 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang dikaruniai empat orang anak;
 - 3) Bahwa Tergugat I kawin lagi dengan perempuan lain bernama IN (Tergugat II), hal itu saksi ketahui karena sekampung dengan Tergugat II;
 - 4) Bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 5) Bahwa setelah Penggugat mengetahui perkawinan itu, Penggugat pernah mendatangi dan memarahi Tergugat II sehingga Tergugat I tidak pernah lagi menemui Tergugat;
- 6) Bahwa sekarang Tergugat I tinggal bersama atau serumah dengan Penggugat.

b. Saksi II adalah Hj.Ati Binti Mansyur

- 1) Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri, kemudian Tergugat I kawin lagi dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Bahwa setelah Penggugat mengetahui perkawinan tersebut, Tergugat I membuat surat pernyataan di muka Kepala Lingkungan Lumu-Lumu untuk menceraikan Tergugat II;
- 4) Bahwa sekarang Penggugat serumah dengan Tergugat I.

Dengan adanya alat bukti baik itu berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat dipersidangan maka kuatlah pembuktian yang diajukan penggugat ditambah lagi pengakuan tergugat I yang mengakui semuanya dan tidak bisa membuktikan sebaliknya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar

Pertimbangan hukum menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta, atau kejadian, kaitannya hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan, hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari penggugat ataupun tergugat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pertimbangan hakim dan putusan tidak dapat dipisahkan. Berikut ini pemaparan menurut salah satu hakim terkait keabsahan suatu putusan.

Putusan akan dianggap cacat apabila tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus yang diawali dengan kata “menimbang” dan dasar memutus diawali dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang dipaparkan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan para pihak beserta dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara menyeluruh tidak boleh ada yang kurang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara..

Berikut ini pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara 827/Pdt.G/2007/PA Makassar :

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka mereka harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan tergugat II yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2007 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 822 / 84 / VII / 2007 bertanggal 27 Agustus 2007 .

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan poligami yang melanggar ketentuan hukum sebab perkawinan itu berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama dan juga tanpa sepengetahuan penggugat, bahkan Tergugat I telah memalsukan identitasnya sehingga Tergugat III melakukan pencatatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pembatalan perkawinan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah sehingga secara formil penggugat berkualitas sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, ternyata Penggugat dan Tergugat I memang telah melangsungkan perkawinan di Makassar sejak tanggal 25 maret 1984, dan perkawinan itu telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah. Dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Tahun 1974 Jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil terbukti Penggugat berkualitas sebagai pihak yang dapat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan poligami antara Tergugat I dengan Tergugat II berlangsung tanpa izin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 15 Agustus 2007 yang mana telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dengan menggunakan data yang tidak benar, sebab dalam bukti P.2 itu status tergugat I dinyatakan jejaka, padahal Tergugat I telah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagai istri pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Tergugat I telah memalsukan identitasnya sehingga Tergugat III (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate) mencatat perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, yaitu Sanga binti Baso dan Hj. Ati binti Mansur telah memberikan pula keterangan di bawah sumpah bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berlangsung tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah Penggugat mengetahuinya, Tergugat I tidak lagi menemui Tergugat II, dan sekarang Tergugat I tinggal bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah melanggar hukum karena perkawinan itu berlangsung tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan oleh karena itu pula sesuai dengan ketentuan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Akta Nikah, No 822 / 84 / VIII / 2007 bertanggal 15 Agustus 2007 sebagai akta autentik yang mendasari perkawinan tersebut harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta memperhatikan ketentuan 149 R.Bg serta ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenan.

Mengingat bahwa Majelis hakim telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka majelis hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk mmenghadap di persidangan, tidak hadir;

- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3) Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2007;
- 4) Menyatakan Akta Nikah, Nomor 822 / 84 / VII / 2007 bertanggal 15 Agustus 2007 atas perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum;
- 5) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.206.000,00 (satu huta dua ratus enam ribu rupiah).

- Analisa Penyusun

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena sebagai pihak yang berwenang. Penggugat merasa dibohongi dengan pemalsuan identitas dan merasa berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Penggugat mengetahui adanya unsur pemalsuan dan melanggar hukum dalam perkawinan tersebut.

Tindakan memalsukan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melangsungkan perkawinan keduanya dengan Tergugat II dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Perbuatan Tergugat I dapat dikatakan atau dikategorikan kepada kejahatan terhadap asal usul perkawinan, yakni Tergugat I menyembunyikan perkawinan yang terdahulu dengan mengatakan bahwa ia berstatus jejaka dengan memperlihatkan atau mempergunakan surat keterangan palsu untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat II. Padahal perkawinan terdahulunya menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru.

Perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh Tergugat I, selain tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan juga pelaksanaannya tidak mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Keadaan ini jelas membawa kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan. Jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat, atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengambil inisiatif untuk membatalkan perkawinan tersebut. Membatalkan perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas, lebih dipilih daripada membiarkan perkawinan yang merusak tersebut. Alasannya adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya pembatalan tersebut dipandang lebih ringan mudharatnya daripada membiarkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan fakta –fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan kedua belah pihak yang berperkara adalah mengenai perkawinan poligami yang dilakukan Tergugat I tanpa seizin Penggugat dan pengadilan serta melakukan pemalsuan identitas yang menyatakan dirinya jejaka padahal sebenarnya Tergugat I telah beristri.

Menurut penyusun pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar adalah sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang mana dalam persidangan terbukti perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan, dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan

bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan harus mendapat persetujuan dari pihak istri yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

1. Akibat terhadap hubungan suami istri

Dengan adanya putusan majelis hakim yang membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II hal ini berakibat kedudukan Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan ikatan perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Atau perkawinan yang pernah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada, dalam artian perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁴

Suami istri yang perkawinannya dibatalkan, berpisahya berbeda dengan suami atau istri yang berpisah karena talak, berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri tersebut.

a. masalah Iddah

As Sayyid Sabiq berpandangan bahwa hubungan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap sebagai *wati'syubhat*. Persetubuhan yang subhat itu sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini maka sama kewajiban iddahnya.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan, fungsinya adalah untuk memberi keyakinan apakah istri itu hamil atau tidak, sehingga menjadi jelas nasab anak yang

⁴ AR. Buddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar, Tanggal 7 juli 2014.

dikandungnya. Penetapan iddahnya dimulai sejak keputusan hakim tentang ketetapan pembatalan perkawinan tersebut.

Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa waktu iddah bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan sama dengan waktu iddah karena talak.

b. Masalah Nafkah

Seorang wanita yang perkawinannya dibatalkan atau karena terjadi *wati syubhat* walaupun sudah dicampuri, ia tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah.

Pendapat yang sama menyatakan bahwa hak nafkah mantan istri gugur bila akad nikah yang dilakukan ternyata batal atau fasid atau rusak.

2. Akibat hukum yang berhubungan dengan anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Sehubungan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami istri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami dan istri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Terhadap harta bersama, maka harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama. Hal ini tertuang dengan jelas pada pasal 97 KHI dimana dijelaskan bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri atau masing-masing bekas suami dan bekas istri mendapat separuh.⁵



⁵ Abu Rahman, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 7 Juli 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji, memahami dan meneliti putusan nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar, tentang pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat tinggal suami atau istri.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut oleh karena adanya syarat-syarat perkawinan yang dilanggar, Tergugat I terbukti telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu dan perkawinan poligami tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, Tergugat I juga terbukti telah memalsukan identitasnya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan meliputi akibat hukum yang berhubungan dengan hubungan bekas suami dan bekas istri dimana perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada, akibat hukum yang berhubungan dengan harta bersama dimana harta bersama dibagi dua atau masing-masing bekas suami dan bekas istri mendapat separuh, serta akibat hukum terhadap anak, dimana dengan

adanya pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak mereka.

B. *Implikasi Penelitian*

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas selanjutnya diajukan saran yang dapat dijadikan bahan masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para pihak yang hendak menikah lagi (poligami), wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Kepada Pegawai Pencatat Nikah hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan perkawinan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika dirasa meragukan kalau perlu Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan konfirmasi agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
3. Dapat pula dijadikan bahan masukan bagi pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan sosialisasi undang-undang perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994.
- Anwar, Muh. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*. Bandung: Al- Ma'arif, 1971.
- Azzahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Badan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Doi, A. Rahman I. *Syariah I kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta : Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III; Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Miftah, farid. *150 Masalah Nikah & Keluarga*. Jakarta : Gema Insani, 1999.
- Gassing, Qadir, dan Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar,1986.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tradingco, 1975.
- Kementerian Agama R.I. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Serajaya Santra Indonesia, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,2002.

- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah krusial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1960.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. ed. Muslimin Kara. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad . *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2; Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1992.
- Shadly, Hasan . *Ensiklopedia Nasional*. Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hakekat Poligami dalam Islam*. Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UU Press, 1974.
- Tim Redaksi Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta : Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi Ensiklopedia. *Ensiklopedia Islam I*. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, light green emblem. It features a stylized archway at the top, with a central yellow star containing the year '1965'. Below the archway is a large, stylized letter 'A' that forms the base of the emblem.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



ILYAS. Dilahirkan di Turikale Kabupaten Maros Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Oktober 1991, penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda Muh. Rusdi Mude dan Ibunda Siti Aisyah. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SD No.8 Pappandangan, setelah tamat SD pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Assa Adah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan tamat pada tahun 2006 dan pada tahun Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pesantren Yadi Sulawesi Selatan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2010 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga meraih gelar sarjananya di tahun 2014. Keinginan dan harapan terbesarnya agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat berguna bagi bangsa dan negara.

MOTTO : JANGAN MENUNDA SAMPAI HARI ESOK APA YANG BISA KAU KERJAKAN HARI INI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R